

PRAKTIK POLITIK DALAM CERPEN *WEBSITE SUARA SAKING BALI*: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA

Ni Putu Novsa Dewi

Prodi Linguistik Program Magister, Universitas Udayana

Email: novsadedwi26@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik yang terdapat dalam cerpen-cerpen website Suara Saking Bali. Cerpen-cerpen tersebut, yaitu cerpen 3M, cerpen *Caleg*, cerpen *Pilbup*, cerpen *Teken Apang Néken*, dan cerpen *Krimik Politik I Déngkék tekén I Lojor*. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra dengan metode studi pustaka. Teknik *purposive sampling*, teknik baca, teknik catat, dan teknik terjemahan digunakan dalam pengumpulan data. Metode deskriptif-analitik digunakan dalam tahap analisis data. Metode informal digunakan dalam tahap penyajian hasil analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah cerpen-cerpen tersebut mengandung praktik kecurangan politik yang terdiri atas ketidakadilan hukum, pemimpin sogokan dan tidak berkualitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme, politik dinasti, sifat tidak demokratis, serta praktik *money* politik. Ideologi praktik politik ini disampaikan oleh pengarang dengan menambahkan gagasan ke dalam cerpen, menyodorkan gagasan sebagai konvensi, memunculkan gagasan sebagai perilaku tokoh utama, dan melarutkan gagasan dalam keseluruhan cerita sesuai dengan pendapat Raymond Williams.

Kata Kunci: Praktik Politik, Cerpen, Sosiologi Sastra

A B S T R A C T

This research aims to analyze political practices found in short stories on the website Suara Saking Bali. The short stories include 3M, Caleg, Pilbup, Teken Apang Néken, and Krimik Politik I Déngkék tekén I Lojor. This study applies literary sociology theory using a literature review method. Purposive sampling techniques, reading techniques, note-taking, and translation techniques were used for data collection. The descriptive-analytical method was employed in the data analysis stage, while the informal method was used in presenting the analysis results. The findings of this research indicate that the short stories depict political malpractices, including legal injustice, bribery-prone and unqualified leaders, corruption, collusion, nepotism, dynastic politics, undemocratic traits, and money politics. The ideology of this political practice is conveyed by the author by incorporating ideas into the short story, presenting ideas as conventions, manifesting ideas through the main character's behavior, and infusing ideas throughout the entire story in line with Raymond Williams' perspective.

Keywords: Political Practice, Short Story, Sociology of Literature



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright© 2024 by Author. Published by Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Received: July, 2024

Revised: August, 2024

Accepted: October, 2024

Published: November, 2024

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan perayaan demokrasi yang diselenggarakan dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin yang jujur dan terbuka. Pemilu bertujuan untuk menemukan pemimpin yang mampu membawa perubahan kondisi rakyat menjadi lebih baik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tedjo, 2018). Meskipun tujuan pemilu adalah untuk kebaikan rakyat,

di sisi lain masih banyak ditemukan kecurangan dalam praktik politik baik ketika menjelang pemilihan, masa pemilihan, maupun kecurangan praktik politik ketika seorang menjadi pemimpin.

Kecurangan praktik politik yang banyak dijumpai adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau kerap disingkat KKN. Berdasarkan atas laporan *Indonesia Corruption Watch* yang dikutip dari laman databoks (Muhamad, 2024) sepanjang tahun 2023 di Indonesia terjadi 791 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 28,4 triliun. Atas kasus tersebut selanjutnya sebanyak 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi ini tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan, tetapi juga terjadi di desa, sektor utilitas, dan sektor lainnya. Kecurangan dan pelanggaran politik lainnya adalah *money politic*. Pelanggaran ini dilakukan baik secara perorangan atau menyangkut partai. *Money politic* umumnya dilakukan pada saat kampanye dengan memberikan uang kepada orang atau sekelompok orang agar mau memilih calon yang telah ditentukan. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi dalam satu kali periode pemilihan, namun terjadi secara berulang dan seolah-olah telah membudaya di Indonesia. Ini tentu merupakan sebuah ironi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan menodai esensi demokrasi Indonesia (Nabila, dkk., 2020).

Maraknya kecurangan praktik politik yang terjadi menghasilkan banyak reaksi dari berbagai pihak, satu di antaranya adalah pengarang melalui karya sastra. Ini sesuai dengan hakikat sastra yang mencerminkan masalah manusia dan kemanusiaan (Artajaya 2020: 194). Pengarang dengan kepekaan sosial yang dimiliki selanjutnya menjadikan realitas sosial sebagai tema dalam karyanya. Realitas sosial (politik) ini tidak disajikan begitu saja namun, telah melalui proses kreatif sehingga mencerminkan cara pandang pengarang tersendiri. Dengan demikian, dalam proses kreatif penciptaan karya pengarang senantiasa dipengaruhi oleh keadaan sosial di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menganggap bahwa sastra merupakan cerminan dan refleksi kehidupan sosial suatu masyarakat (Alsyirad dan Rosa 2020).

Di sisi lain, sastra yang memiliki esensi sebagai cerminan masyarakat kerap dijauhkan dengan ranah politik. Begitu pula sebaliknya, para elite politik senantiasa melakukan kebijakan untuk menindak, menutup bahkan memusnahkan sastra yang mengungkapkan masalah politik. Hal ini terbukti sejak masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Karya-karya bernuansa sosialis dan karya bertema ajaran moral cenderung diabaikan. Karya sastra dituntut agar bebas dari masalah politik (Taum dalam Setijowati 2018: 2). Keadaan yang berbeda justru terjadi seiring berjalannya waktu yang sejalan dengan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Karya sastra yang secara khusus mengangkat masalah politik dan kekuasaan di Indonesia mulai muncul kembali dan mendapat perhatian serta posisinya tersendiri. Sebut saja *Tetralogi Buru* karya Pramoedya Ananta Toer, novel *Lelaki Harimau* karya Eka Kurniawan, novel *Amba* karya Laksmi Pamuntjak dan karya bertema politik lainnya yang telah disebarluaskan dan dapat dibaca orang banyak orang.

Tidak hanya melalui karya sastra dalam bentuk cetak, karya sastra yang termuat dalam media *online* dewasa ini turut memberikan reaksi terhadap kondisi politik di Indonesia. Termuatnya karya-karya yang bertema praktik politik dalam media digital mencerminkan adanya kebijakan negara yang mampu menaungi kebebasan ekspresi bagi pengarang. Satu di antaranya adalah cerpen-cerpen berbahasa Bali bertema politik yang dimuat oleh website *Suara Saking Bali*. Situs ini merupakan salah satu media bagi sukarelawan untuk menerbitkan karyanya dengan tidak berbayar dan tidak dibayar. Penulis diharapkan menulis karangan sesuai jenis karya yang bisa dimuat dengan memperhatikan ketentuan tidak plagiat dan tidak mengandung unsur SARA (<https://www.suarasakingbali.com/p/ngenenin-indik-blog-suara-saking-bali.html>).

Dipilihnya website *Suara Saking Bali* karena merupakan media publikasi independen yang dianggap bebas dari kuasa tertentu dan dianggap dapat menyampaikan gagasan dengan lebih terbuka. Selanjutnya dipilih karya sastra genre cerpen karena merupakan karya sastra yang

singkat namun mengandung isi padat. Dengan kata lain pembaca dapat dengan cepat mengetahui isi dan pesan yang terkandung di dalam cerpen. Pemilihan cerpen berbahasa Bali merupakan salah satu respons positif terhadap perkembangan sastra Bali modern yang semakin menunjukkan eksistensinya lewat publikasi digital. Ini tentu penting untuk menghilangkan kesan *kuno* dalam sastra Bali sehingga dapat menjangkau pembaca yang lebih luas dan berimbas pada penyampaian pesan yang lebih luas pula.

Melihat latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji lima cerpen yang termuat dalam website *Suara Saking Bali*. Cerpen-cerpen tersebut berjudul *3M*, *Teken Pang Néken*, *Krimik Politik I Déngkék tekén I Lojor*, *Pilbup*, dan cerpen *Caleg*. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik politik dalam cerpen yang termuat dalam website *Suara Saking Bali* dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Kajian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa dapat melaksanakan praktik politik dengan jujur dan baik.

Teori sosiologi digunakan mengingat cerpen yang dipilih mengandung masalah sosial dan politik. Ini didasari atas adanya hubungan antara sastra dengan nilai sosial yang dianut oleh pengarang dan pembaca (Muzakka dalam Hastuti 2018: 67). Sosiologi sastra meneliti dalam tiga cakupan, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi pembaca, dan sosiologi karya sastra. Secara khusus dalam penelitian ini difokuskan pada kajian sosiologi dalam karya sastra dengan melihat hubungan sastra dengan politik dalam cerpen. Atas tinjauan ini selanjutnya dapat diketahui realitas sosial yang mempengaruhi terjadinya praktik politik tersebut dan ideologi pengarang dalam menyampaikan gagasannya.

Penelitian terkait hubungan sastra dengan politik dalam cerpen pernah dilakukan oleh Pradjoko (2012), Sunanda (2017), Wahidah (2018). Kajian tersebut fokus terhadap politik dan konflik sosial, politik dan latar sosial, serta kekuasaan sosial dan politik. Sementara itu penelitian cerpen berbahasa Bali di antaranya dilakukan oleh (Nusantari 2021) pernah meneliti realitas sosial masyarakat Bali dalam kumpulan cerpen *Aud Kelor* dan menyinggung praktik ketidakadilan hukum. Selanjutnya, Sujaya, dkk (2024) meneliti permasalahan sosial masyarakat Bali dalam cerpen berjudul *Cetik* dan menyinggung masalah keserakahan jabatan.

Berdasarkan atas penelitian-penelitian tersebut belum ditemukan analisis terhadap cerpen-cerpen yang dimuat dalam website *Suara Saking Bali* yang menaruh fokus pada praktik kecurangan politik dengan teori sosiologi sastra. Dengan demikian penelitian ini merupakan bentuk dukungan guna melengkapi kajian tentang politik pada khazanah sastra Bali modern. Penelitian ini juga merupakan bentuk pengembangan dan dukungan terhadap kajian sosiologi sastra dalam cerpen digital berbahasa Bali khususnya dalam melihat hubungan sastra dengan politik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode dan teknik penelitian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data dengan metode studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan kajian yang berkaitan dengan etika dan nilai yang berkembang di masyarakat dan dikumpulkan melalui media kepustakaan, seperti buku, karangan, dan catatan lainnya (Sugiyono 2016: 291). Dalam pengumpulan data, metode studi pustaka ditunjang dengan teknik *purposive sampling* yaitu pencarian cerpen pada website *Suara Saking Bali*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan dan pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan peneliti terkait sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif sesuai kebutuhan dan tujuan peneliti (Babbie dalam Retnawati, 2017: 4). Pencarian dilakukan dengan memanfaatkan fitur *search* dan memasukkan kata kunci yang berkaitan dengan politik. Selanjutnya cerpen bertema politik yang ditemukan dibaca lalu dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Cerpen-cerpen yang dipilih adalah cerpen yang mengandung tema tentang praktik kecurangan politik. Terdiri atas lima cerpen berbahasa Bali yang berjudul cerpen *3M* karya Luh Wida Apriani tahun 2015, cerpen *Caleg* karya I Putu Supartika tahun 2018, *Pilbup* karya IDK raka Kusuma tahun 2019, *Teken Apang Néken* karya Madé Sugianto tahun 2020, dan *Krimik Politik I Déngkék tekén I Lojor* karya Madé Adnyana Olé tahun 2020. Data primer tersebut mencakup kata, frasa, klausa, kalimat, atau paragraf dalam cerpen yang menunjukkan adanya kecurangan praktik politik. Sementara data sekunder dalam penelitian ini berupa data tambahan dari artikel, buku, dan sumber lainnya yang dapat menunjang analisis.

Setelah cerpen dipilih dan terkumpul, selanjutnya cerpen-cerpen tersebut dibaca berulang sesuai kebutuhan peneliti dan dicatat hal penting di dalamnya untuk pengumpulan data lanjutan. Dalam tahap pengumpulan data juga menggunakan teknik terjemahan secara ideomatik dan harfiah. Terjemahan dilakukan dari bahasa Bali sebagai bahasa sumber ke bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. Kedua, metode deskriptif-analitik digunakan pada tahap analisis data. Metode ini dibantu dengan teknik baca dan catat untuk menganalisis data sesuai kebutuhan penulis. Sementara metode informal digunakan pada tahap ketiga, yakni tahap penyajian hasil analisis data. Penyajian hasil analisis data menggunakan bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Praktik politik merupakan segala bentuk pelaksanaan tentang urusan ketatanegaraan dan kenegaraan. Dalam kajian ini praktik politik yang dimaksudkan adalah segala bentuk pelaksanaan politik yang diwarnai dengan kecurangan sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut merupakan bentuk-bentuk praktik politik yang tergambar pada cerpen-
cerpen *Suara Saking Bali*.

Tabel 1. Praktik Politik dalam Cerpen

No	Representasi Praktik Politik	Judul Cerpen
1	Ketidakadilan hukum	<i>3M</i>
2	Pemimpin sogokan dan tidak berkualitas	<i>Krimik Pulitik, I Déngkék tekén I Lojor, 3M</i>
3	Korupsi, kolusi, dan nepotisme	<i>3M, Teken Apang Néken</i>
4	Politik dinasti	<i>Pilbup</i>
5	Sikap tidak demokratis	<i>Pilbup</i>
6	Money politik	<i>Caleg</i>

Berdasarkan tabel 1. di atas, dapat diketahui bahwa terdapat enam praktik politik yang tercermin dalam lima cerpen terpilih. Cerpen *3M* merupakan cerpen dengan representasi praktik politik terbanyak, yaitu tentang ketidakadilan hukum, pemimpin sogokan dan tidak berkualitas, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya disusul oleh cerpen *Pilbup* dengan dua representasi praktik politik, serta cerpen *Krimik Pulitik, I Déngkék tekén I Lojor, Teken Apang Néken*, dan *Caleg* yang didominasi oleh satu representasi praktik politik.

Ketidakadilan Hukum

Cerpen *3M* memuat bagaimana kondisi hukum di Indonesia yang kerap kali jauh dari keadilan. Ini terlihat dari bagian cerita yang menyatakan bahwa hukum dikuasai oleh uang dan hukum bisa dibeli dengan uang. Orang yang memiliki kekuasaan dan harta bisa memperlakukan hukum, namun tidak bagi masyarakat miskin. Berikut merupakan kutipannya:

Saja suba jaman jani, pipisé ané kuasa, beneh buka ané ada di keneh tiangé, yén ba ada pis apa ané kenehang bisa bakat, apa ané ruet dadi aluh (Cerpen 3M).

....buktiné liu yén anak ané sing ngelah apa, bates ngamaling siap ba masuk bui pitung tiban, yén pangede cara tiang, biar korupsi, kolusi, nepotisme, yén masuk bui maan kamar elit, aluh nyidang celar-celir, pesu mulihan uli hotel prodione, jeg bebas.... (Cerpen 3M).

Terjemahan:

Memang benar jaman sekarang, uang yang berkuasa, benar sesuai dengan apa yang ada di pikiranku, jika sudah memiliki uang apa yang diinginkan bisa didapatkan, apa yang rumit akan menjadi mudah.

....buktinya banyak jika orang yang miskin, hanya mencuri ayam sudah dipenjara selama tujuh bulan, jika pejabat sepertiku, biar korupsi, kolusi, nepotisme, jika penjara mendapat ruangan yang mewah, bisa dengan gampang keluar masuk, pulang pergi dari penjara, sungguh bebas....

Terlihat berdasarkan kutipan di atas bagaimana kekuasaan dan harta yang dimiliki oleh seseorang memberikan dampak pada ketidakadilan hukum. Masyarakat miskin kerap kali kesulitan mendapat layanan hukum dan akses hukum, namun di sisi lain kerap menjadi korban ketidakadilan hukum.

Pemimpin Sogokan dan Tidak Berkualitas

Pemimpin sogokan dan tidak berkualitas terlihat dalam Cerpen *Krimik Pulitik, I Déngké tekén I Lojor*. Berikut merupakan kutipannya:

Pamuputné mapilih I Déngké dadi anggota Déwan....Sing nawang apa. Nak sidang ngomongang Pérda ia seleg mendep.... Nanging amun ada nak ngedum pipis, ia tetep maan duman....Jani, ia suba petang période dadi anggota Déwan.... Jani, durin adané misi témpélan titel SH. Sarjana Hukum....Milu Kejar Pakét A, B, C. Lantas kuliah kapah-kapah, jeg sagét ada nak ngabaang ijazah SI (Cerpen Krimik Pulitik, I Déngké tekén I Lojor).

...aget sajan saja tiang, ulian tiang ngelah timpal, ngelah relasi, aluh-aluhan tiang maan dadi DPR, masuk tuah tamatan SMP, ijazah SMA meli, kuliah sing, jeg preman bisa dadi cara kéné (Cerpen 3M)

Terjemahan:

Akhirnya terpilih I Déngké menjadi anggota dewan....tidak tahu apa-apa. Ketika orang-orang sidang membicarakan perda ia selalu diam.... Tetapi ketika ada yang membagikan uang ia tetap mendapatkan bagian.... Sekarang ia sudah empat periode menjadi anggota Déwan.... Sekarang di belakang namanya sudah tertulis gelar S.H.... mengikuti sekolah kejar paket A,B, C. Kuliah sesekali, seketika ada yang membawakan ijazah SI.

....untung sekali diriku, akibat saya memiliki teman, memiliki relasi, dengan gampang bisa menjadi DPR, bersekolah hanya hingga SMP, ijazah SMA didapat dengan membeli, tidak kuliah, preman bisa menjadi seperti ini.

Rendahnya kualitas pemimpin sesuai dengan kutipan di atas dilihat dari tingkat pendidikan, etika, dan latar belakang sosial kehidupan tokoh. I Déngké diceritakan sebagai anggota dewan yang hanya menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SMP namun bisa lolos menjadi anggota dewan hingga empat periode. Meski dalam namanya telah menyandang gelar *SH* sejatinya itu hanya ijazah yang dibeli. Ini menjadi sorotan mengingat tokoh I Déngké sebelumnya hanyalah seorang preman. Kualitas pendidikannya pun berimbas pada kualitasnya dalam memimpin, ia tidak mampu menyuarkan aspirasi rakyat dan hanya mencari keuntungan saja.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi menjadi salah satu hal yang tidak luput dari perhatian pengarang. Berikut merupakan gambarannya dalam cerpen website *Suara Saking Bali*:

Di Désa Pacet jani ada program baru.... panitiané suba nyetor proposal, disubané danané pesu uli pusat, buih jeg masuryak galang kenéh tiangé, prajani gadang matan tiangé limang miliar pesu danané,... Paling melah duang miliar gén salurang ka désa, sisané tiang nyuang.... Masyarakat désa ja lega kenehné, programné majalan lanus, tiang masé gargita, ngujiang tiang tuyuh ngurusang sing maan apa. (Cerpen 3M).

Proyéké ento kawangun nganggon dana bansos.... Di kwitansi kacatri besi 16 tést, nanging ané mapasang besi 10 tést (Cerpén Teken Apang Néken).

Terjemahan:

Di Desa Pacét sekarang ada program baru.... panitianya sudah mengumpulkan proposal, ketika dana sudah dikeluarkan dari pemerintah pusat, aduh seketika bahagia sekali perasaanku, seketika jernih penglihatanku karena dana yang keluar lima miliar.... Sebaiknya hanya dua miliar saja yang disalurkan ke desa sisanya aku yang mengambil.... Masyarakat sangat senang, program berjalan lancar, aku juga bahagia, mengapa aku yang repot mengurus pendanaan tidak mendapat apa pun.

Proyek tersebut dibangun menggunakan dana bansos.... Pada kwitansi tertulis besi 16 test, namun besi yang terpasang hanya 10 test.

Berdasarkan kutipan di atas, korupsi yang terjadi adalah korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan sosial dan penyalurannya ke desa-desa. Dalam kasus tersebut, anggota dewan seakan menjadi tangan pembantu warga agar dapat dengan lebih mudah untuk mendapatkan dana bantuan sosial. Dana bantuan ini kemudian digunakan untuk pembangunan desa. Di sisi lain, anggota dewan yang seolah-olah membantu pencairan dana tersebut mencari keuntungan. Ia dengan sadar mengambil sebagian dana bantuan sosial untuk menjadi miliknya dan hanya sebagian yang dibagikan kepada masyarakat.

Politik Dinasti

Cerpén *Pilbup* yang diterbitkan oleh *Suara Saking Bali* lima tahun silam turut menunjukkan kondisi yang berkaitan dengan realitas adanya politik dinasti dalam sistem pemerintahan. Berikut merupakan kutipannya:

“Puniki ibuk. Sane dibi okan ibuké rauh ka kantor DPD. Ring arep titiangé, ring ajeng utusan sakéng DPP puniki nganikaang jagi dados bakal calon bupati. Naptar ring partén iragané. Kocap ibuk sampun ngicén. Indiké puniki mangkin jagi takéng. Jakti napi nénten?”. Baan legan kenehné, Luh Wirati sing bisa mesuang pasaut. (Cerpén Pilbup).

Terjemahan:

“Seperti ini, Bu. Kemarin anak Ibu datang ke kantor DPD. Di depanku, di depan utusan dari DPP ini memberitahu bahwa akan menjadi bakal calon bupati. Mendaftarkan diri di partai kita ini. Katanya ibu sudah mengizinkan. Terkait hal itu akan dikonfirmasi sekarang. Apakah hal itu benar?” Akibat perasaan senangnya, Luh Wirati tidak bisa memberikan jawaban.

Kutipan di atas menceritakan tentang Luh Wirati dan anaknya, Gdé Ariana. Luh Wirati merupakan seorang bupati dua periode dan anaknya hendak mencalonkan diri menjadi bupati pula. Awalnya terjadi ketegangan antara Luh Wirati dengan anaknya. Ketegangan terjadi akibat Gdé Ariana awalnya menolak permohonan Luh Wirati agar dirinya mendaftarkan diri di partai yang sebelumnya telah memenangkan ibunya. Gdé Ariana menolak dan akan mendaftarkan diri di partai lain, ia menilai partai tempat ibunya bergabung adalah partai yang arogan, tidak baik, dan banyak memiliki kader yang curang. Entah apa yang terjadi, beberapa waktu setelah pertengkaran itu Gdé Ariana justru mendaftar di partai yang sama dengan ibunya. Ia mengatakan bahwa sudah mendapat izin dari ibunya.

Sikap Tidak Demokratis

Cerpén *Pilbup* selain mencerminkan praktik politik berupa politik dinasti juga menunjukkan sifat tidak demokratis yang dimiliki oleh kelompok partai tertentu. Berikut merupakan kutipan yang menunjukkan sikap tidak demokratis dalam cerpén *Pilbup*:

Parténé ténénan, kéto Gdé Ariana nyambat, parté misi provokator sing dadi kalahang. Mabukti, dugas kalah pemilihan gubernuré atiban ané liwat, provokator sig parténé ento mrovokatorin

krama parténé. Krama perténé ngamuk. Kantor bupati uuga. Punyan-punyanan di sisin rurungé balbala, kantor parténé ané ngalahang seduta (Cerpen Pilbup)

Terjemahan:

Partai ini, demikian kata Gdé Ariana, partai yang di dalamnya berisi provokator yang tidak mau dikalahkan. Terbukti ketika kalah dalam pemilihan gubernur yang lalu, provokator dalam partai tersebut kemudian memprovokasi anggota partainya. Anggota partai itu kemudian mengamuk, kantor bupati dirusaknya. Pohon-pohon di pinggir jalan dihabiskan, kantor partai yang mengalahkan dihancurkan.

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana sifat tidak demokratis oknum partai saat mengalami kekalahan dalam pemilihan kepala daerah. Sikap tidak demokratis ini tidak hanya dalam perkataan, namun hingga mengarah pada tindakan kekerasan dengan merusak kantor bupati. Tidak hanya itu, kantor partai pemenang pun turut dihancurkan akibat provokasi dan sifat tidak demokratis yang dimiliki.

Money Politic

Money Politic menjadi tema utama dalam cerpen *Caleg*. Berikut merupakan salah satu kutipannya:

Tusing kaitung kudang pipis kadén ané suba pesuanga anggona ngalih dukungan. Emas gelah reramane makejang adepa. Kéto masih sértifikat tanahne masih magadé di bank. Ipun masih nyilih pipis di bank (Cerpen Caleg).

Terjemahan:

Tidak terhitung entah berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk mencari dukungan. Emas milik orang tuanya semua dijual. Demikian pula dengan sertifikat tanah juga digadai di bank. Ia juga meminjam uang di bank.

Kutipan di atas menunjukkan seorang calon anggota legislatif yang sedang melakukan kampanye untuk pemilihan dirinya. Dalam proses kampanye banyak uang yang telah dikeluarkan. Hal ini karena calon legislatif tersebut berusaha memengaruhi suara masyarakat dengan memberikan mereka uang dalam setiap kegiatan. Alhasil menyebabkan ia mengeluarkan banyak uang hingga menggadaikan aset milik keluarganya demi sebuah kemenangan yang belum dapat dipastikan.

Pembahasan

Lima cerpen website *Suara Saking Bali* yang dipilih menunjukkan enam praktik kecurangan politik, yaitu ketidakadilan hukum, pemimpin sogokan dan tidak berkualitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme, politik dinasti, sifat tidak demokratis, serta praktik *money politic*. Enam praktik politik ini merupakan cerminan atas praktik kecurangan politik yang marak terjadi dalam sistem pemerintahan baik di Bali maupun di Indonesia secara umumnya. Sebagaimana yang sering diungkapkan, bahwa penciptaan sebuah karya sastra tidak bisa dilepaskan dari kenyataan, baik berupa kisah hidup manusia, kisah terjadinya suatu peristiwa tertentu, pengalaman dan lingkungan penulis, serta berbagai faktor lainnya (A'ini dan Sudaryanto, 2024: 45). Ini tidak berbeda dengan lima cerpen website *Suara Saking Bali*, praktik kecurangan politik yang tergambar dalam cerpen juga dapat dijumpai dalam kehidupan nyata, begitu pula sebaliknya.

Sebut saja praktik politik tentang ketidakadilan hukum sebagaimana yang digambarkan dalam cerpen *3M*. Agaknya tidak berlebihan jika menyebut tema ini identik dengan apa yang terjadi di masyarakat. Kita dapat melihat bahwa dalam beberapa kasus hukum yang harusnya digunakan menegakkan keadilan justru tidak jarang hanya diberikan kepada rakyat kecil dan seolah-olah sama sekali tidak mengikat golongan kuasa (Putri 2022: 8). Sebagai contoh, dikutip dari readmore (Puspita 2024) tiga nelayan di Pandeglang divonis bersalah setelah menangkap ikan dengan total senilai seratus ribu rupiah di Taman Nasional Ujung Kulon tahun 2014 silam.

Keadaan berbeda dapat dinikmati oleh kaum elite ketika mereka melakukan tindak pidana. Mereka dapat dengan mudah menggunakan uang dan kekuasaan yang dimiliki untuk mengatur dan membeli hukum sesuai dengan kepentingannya. Tidak jarang hakim menerima suap dan pada akhirnya pelaku pelanggaran dibebaskan atau mendapat hukuman yang tergolong ringan.

Pengarang cerpen *3M* menggambarkan ketidakadilan hukum di Indonesia dengan menyampaikan ideologinya sebagai sebuah konvensi (Williams dalam Supsiadji 2011: 41). Konvensi yang dimaksudkan berkaitan dengan pandangan masyarakat bahwa hukum seolah-olah telah mendarah daging hanya diatur untuk kepentingan yang menguntungkan golongan tertentu. Selain itu gambaran cerita ini menguatkan kembali pandangan bahwa hukum terkesan ditegakkan dengan kaku tanpa diimbangi dengan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Ini menimbulkan kesan bahwa hukum yang memberatkan masyarakat miskin tetap dibiarkan membudaya di masyarakat.

Pemimpin seyogyanya merupakan sosok bijaksana dan akal sehat yang baik (Antari 2018: 69). Praktik politik dalam cerpen *Krimik Pulitik, I Déngkék tekén I Lojor* dan cerpen *3M* justru menunjukkan hal yang berbeda. Kedua cerpen itu menunjukkan kasus pemimpin yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan kemampuan memimpin yang kurang memadai. Gambaran ini ditunjukkan oleh pengarang melalui perilaku tokoh utama (Williams dalam Supsiadji 2011: 41). Kualitas pemimpin menjadi sorotan dalam perilaku tokoh karena akan sangat memberikan pengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Apabila seorang pemimpin memiliki kualitas yang kurang dalam hal akademik, etika, dan moral tentu akan memunculkan masalah lain yang merugikan, seperti pemimpin yang sewenang-wenang, korupsi, dan lain sebagainya.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang kerap menyebabkan rasa terlena sehingga lupa akan makna hakiki seorang pemimpin sebagai pengayom masyarakat (Libon dan Sadwika, 2019: 73). Sifat terlena dengan kekuasaan menyebabkan pemimpin rentan melakukan korupsi seperti kasus korupsi yang digambarkan pada cerpen *3M* (2015) dan cerpen *Teken Apang Néken* (2020). Kasus korupsi dalam cerpen ini identik dengan maraknya kasus korupsi tahun 2014 silam dan kasus korupsi lainnya yang masih marak terjadi hingga kini. Setidaknya 30 kasus korupsi diungkap oleh Polri kala itu dari kasus korupsi pengadaan infrastruktur hingga alat kesehatan (liputan6, 2014). Praktik politik ini digambarkan dengan penuh perhatian oleh pengarang yang terlihat dari dominasi tema korupsi pada cerpen *3M* dan cerpen *Teken Apang Néken*.

Tidak jauh berbeda dengan politik dinasti yang juga menjadi tema dominan dalam cerpen *Pilbup*. Cerpen ini secara fokus mengisahkan tentang pemunculan calon pemimpin dari lingkup keluarga pemimpin yang sedang berkuasa, yaitu dari ibu kepada anaknya. Fokus penceritaan praktik politik ini ditunjukkan dengan strategi pengarang yang menampilkan gagasannya melalui perilaku tokoh utama. Perilaku tokoh ini kemudian menggerakkan cerita yang menyiratkan pesan bahwa politik dinasti merupakan kegagalan demokrasi. Politik dinasti dinilai membatasi munculnya calon pemimpin berkualitas sebagaimana hakikat diselenggarakannya pemilu. Hal ini karena politik dinasti menghasilkan kesan bahwa hanya keluarga sang penguasalah yang dapat melanjutkan kepemimpinan. Tak jarang politik dinasti kerap dipandang negatif akibat maraknya kasus suap dan korupsi yang terjadi di belakangnya (Dedi 2022: 94 - 95). Praktik politik yang berkaitan dengan sifat demokratis turut hadir dalam cerpen *Pilbup*, meski tidak secara dominan. Ini tidak dapat diabaikan karena sikap tidak demokratis merupakan sikap yang menodai demokrasi.

Selanjutnya tentang politik uang. Politik uang kerap terjadi dalam pemilu untuk memengaruhi dan mencari dukungan suara masyarakat (Nabila, dkk., 2020: 140 - 141). Sama halnya dengan apa yang dilukiskan oleh pengarang dalam cerpen *Caleg*, politik uang merupakan cara yang curang untuk mencari dukungan dengan uang. Gambaran cerita dalam cerpen *Caleg* menyiratkan bahwa *money politik* merupakan sebuah konvensi yang

menghasilkan kecenderungan hanya orang kaya yang bisa menjadi pemimpin karena memerlukan uang yang banyak dalam mencari dukungan. Ini yang secara tidak langsung akan membatasi lahirnya pemimpin yang memang berkualitas. Pemimpin yang terlahir dari politik uang umunya berimbas pada gaya kepemimpinan yang curang, seperti melakukan korupsi. Tindakan korupsi dilakukan untuk mengembalikan biaya kampanye yang sebelumnya digunakan untuk membeli dukungan rakyat (Begouvic dan Cuan, 2021: 106-107).

PENUTUP

Simpulan

Sebagaimana hakikatnya sebuah karya sastra yang tidak pernah lepas dari realitas kehidupan, cerpen *3M*, *cerpen Caleg*, *cerpen Pilbup*, *cerpen Teken Apang Néken*, dan *cerpen Krimik Politik I Déngkék tekén I Lojor* dalam website *Suara Saking Bali* turut memberikan gambaran terkait praktik politik yang mempengaruhi tema atau jalan cerita dari masing-masing cerpen tersebut. Adapun praktik politik itu terdiri atas ketidakadilan hukum, pemimpin sogokan dan tidak berkualitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme, politik dinasti, sifat tidak demokratis, serta praktik *money politik*. Hadirnya isu politik dalam cerpen website *Suara Saking Bali* tak lepas dari kedudukannya sebagai website sukarela yang bebas kuasa sehingga kecurangan praktik-praktik politik dapat disampaikan dengan terbuka dan tetap tidak menyinggung suku, ras, dan aliran politik tertentu. Dalam penyampaian ideologi praktik politik pada cerita, pengarang menggunakan beberapa cara untuk menunjukkan hubungan sastra dan politik sesuai pendapat Raymond Williams. Berdasarkan tujuh strategi yang ada, hanya lima strategi yang ditemukan yaitu dengan menambahkan gagasan ke dalam cerpen, menyodorkan gagasan sebagai konvensi, memunculkan gagasan sebagai perilaku tokoh utama, dan melarutkan gagasan dalam keseluruhan dunia fiksi.

Saran

Penelitian ini merupakan penelitian awal yang mengkaji cerpen-cerpen pada website *Suara Saking Bali* dalam fokus kecurangan praktik politik dengan kecenderungan kajian yang deskriptif. Dengan demikian perlu adanya peninjauan kembali dengan analisis yang lebih dalam atas apa yang telah dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian lanjutan terkait sastra dan politik atau dalam sudut pandang lain tentu diperlukan untuk menyempurnakan kajian terhadap cerpen-cerpen yang ada di website *Suara Saking Bali*. Dengan demikian, peneliti pula menerima dengan terbuka segala bentuk kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Kepada para pengarang cerpen, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan melahirkan karya yang luar biasa. Kepada website *Suara Saking Bali*, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah memberikan media yang terbuka lebar untuk mengembangkan sastra Bali modern baik dalam publikasi maupun apresiasi karya sastra.

REFERENSI

- A'ini, Dwi Nurul, dan Memet Sudaryanto. 2024. "Pendekatan Sosiologi Sastra dan Realitas Sosial pada Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari." Hlm. 44–52 dalam *Prosiding Seminar Nasional Kolaborasi Akademik Dosen-Mahasiswa*. Vol. 2.
- Alsyrad, Ridwan, dan Helvy Tiana Rosa. 2020. "Kritik Sosial Dalam Cerpen Langit Makin Mendung Karya Kipanjikusmin: Tinjauan Sosiologi Sastra." *Arkhaish-Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia* 11(1):15–19.

- Antari, Luh Putu Swandewi. 2018. "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA TARI KECAK." *Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni* 7(1):57–74. doi: 10.59672/stilistika.v7i1.97.
- Artajaya, Gede Sidi. 2020. "EKSISTENSI NILAI-NILAI TRADISIONAL DI BALI DALAM ANTOLOGI CERPEN 'MANDI API' KARYA GDE ARYANTHA SOETHAMA." *Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni* 8(2):192–206. doi: 10.59672/stilistika.v8i2.767.
- Begouvic, M. Eza Helyatha, dan Bayu Cuan. 2021. "MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA." *SOL JUSTICIA* 4(2):105–22. doi: 10.54816/sj.v4i2.451.
- Dedi, Agus. 2022. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8(1):92–101.
- Hastuti, Nur. 2018. "Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer Kajian Sosiologi Sastra." *Humanika* 25(1):64–74.
- Libon, Yovita, dan I. Nyoman Sadwika. 2019. "KRITIK SOSIAL DALAM KUMPULAN CERPEN LELUCON PARA KORUPTOR KARYA AGUS NOOR." *Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni* 8(1):65–77. doi: 10.59672/stilistika.v8i1.578.
- liputan6. 2014. "30 Kasus Korupsi Diungkap Polri Sepanjang Tahun 2014." Diambil 10 Oktober 2024 (<https://www.liputan6.com/news/read/2145001/30-kasus-korupsi-diungkap-polri-sepanjang-2014?page=5>).
- Muhamad, Nabilah. 2024. "Ada 791 Kasus Korupsi di Indonesia pada 2023, Terbanyak di Desa." *databoks*. Diambil (<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/44c634adc9d6d34/ada-791-kasus-korupsi-pada-2023-potensi-kerugian-rp28-triliun>).
- Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar. 2020a. "PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA." *Notarius* 13(1):138–53. doi: 10.14710/nts.v13i1.29169.
- Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, dan Muhamad Azhar. 2020b. "Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia." *Notarius* 13(1):138–53.
- Nusantari, Ni Luh Putu Nirani. 2021. "GAMBARAN REALITAS SOSIAL MASYARAKAT BALI DALAM KUMPULAN CERPEN AUD KÉLOR KARYA CARMA CITRAWATI." *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni* 9(2):272–91.
- Pradjoko, Didik. 2012. "PERISTIWA SEKITAR KRISIS NASIONAL 1965 SEBAGAI LATAR SOSIAL-POLITIK DALAM KARYA SASTRA INDONESIA 1966-1974: Kajian Awal Atas Cerpen-Cerpen dalam Majalah Sastra dan Majalah Horison." *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra* 1(1). doi: 10.26499/jentera.v1i1.11.
- Puspita, Dalima. 2024. "Isu Ketidakadilan Hukum di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir." Diambil 10 Oktober 2024 (<https://readmore.id/isu-ketidakadilan-hukum-di-indonesia/>).
- Putri, Bilqis Lantika. 2022. "Ketidakadilan Penegak Hukum di Indonesia." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah: Yogyakarta*.
- Retnowati, Heri. 2017. "Teknik pengambilan sampel." Hlm. 1–7 dalam *Disampaikan pada workshop update penelitian kuantitatif, teknik sampling, analisis data, dan isu plagiarisme*.
- Setijowati, Adi. 2018. "Kekerasan Simbolik dalam Nyali Karya Putu Wijaya: Karya Sastra, Politik, dan Refleksi." *Mozaik Humaniora* 18(1):1–14.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sujaya, I. Made, Adhi Dwipayana I Kadek, dan Liswahyuningsih Ni Luh Gede. 2024. "Paradoks Perubahan Sosial Bali dalam Cerpen Indonesia dan Bali Modern." *Stilistika : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni* 12(2):231–44. doi: 10.59672/stilistika.v12i2.3883.
- Sunanda, Adyana. 2017. "Pandangan masyarakat tentang sistem kekuasaan sosial dan politik (Kajian terhadap cerpen yang berjudul 'Paman Gober' karya Seno Gumira Ajidarma perspektif strukturalisme-genetik)." *Kajian Linguistik dan Sastra* 27(2):114–25.
- Supsiadji, Mateus Rudi. 2011. "Aplikasi Teori Strukturalisme Genetik, Feminisme, Sastra & Politik, Teori Hegemoni, Resepsi Sastra dalam Penelitian Mahasiswa." *PARAFRASE: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan* 11(01).
- Tedjo, Pratiwi. 2018. "Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan Dan Harapan." *Mimbar Administrasi* 15(1):21–29.
- Wahidah, Fithroh. 2018. "Konflik Sosial dan Politik dalam Kumpulan Cerpen Drama Itu Berkisah Terlalu Jauh Karya Puthut Ea: Kajian Sosiologi Sastra." *Jurnal Ilmiah Buana Bastra: Bahasa, Susastra, dan Pengajarannya* 5(1):10–17.
- <https://kbbi.web.id/politik>
- <https://kbbi.web.id/praktik>